

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Abdul Wahid & Muhibbin, *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Askara, 2001.

Achmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.

Anton Sujata, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, *Modul Integritas*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, 2016.

Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bona P. Purba, *Fraud dan Korupsi, Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Lestari Kiranatama, 2015.

Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.

-----, *Thinking Paradigm of Judges for Law Enforcement in Indonesia: From Positivism to Realism*, Conference: 6th Annual International Conference on Law, Regulations and Public Policy, LRPP 2017.

- Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1990.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Franz Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Masyarakat*, Jakarta: APTIK Gramedia, 1991.
- Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993.
- Hartono et al., *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Hendra Nurtjahjo, et. al., *Memahami Maladministrasi*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Huala Adolf & A. Candrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Ismail Saleh, *Ketertiban dan Pengawasan*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1988.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- , *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Juniver Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, England: JG Publishing, 2012.
- LAN-BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), 2000.
- Ledivina V. Carino, *Bureaucratic Corruption in Asia: Causes, Consequences and Controls*, Quezon City: JMC Pres Inc., 1986.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- M. Subana & Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Marbun S. F. & Mahfud M. D., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- , *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Mirza Nasution, *Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Medan: Puspantara, 2015.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2002.
- Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Morison, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.

- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Otto Cornelis Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bogor: Politea, 1980.
- R.M. Surachman & Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sadjijono, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sedarmayanti, *Good Governance, Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- , *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

-----, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty: Yogyakarta, 1991.

Sumaryono & Anna Erliyana, *Tuntutan Publik Beracara di PTUN*, Jakarta: Primamedia, 1999.

Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: Alumni, 1982.

Sunaryati Hartono, et al., *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.

Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: Media Pratama, 1987.

Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-asas Umum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.

Tim Prenzier & Janet Ransley, *Police Reform*, Annandle: Hawkins Press, 2002.

Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Kamus

Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Jurnal dan Majalah

- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan, Edisi IV/2000.
- Bagir Manan, “Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi XXI/No.243/2006.
- Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri dalam Menangani Perkara”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16/No.2/2016.
- Erick S. Holle, “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktik Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service”, Jurnal Sasi, Vol. 17/No.3/2011.
- Hikmahanto Juwana, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development, Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia”, Varia Peradilan, No.244/2006.
- Joseph S. Nye, “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, American Political Science 51/1967.
- Rhety Ayu & Anis Chariri, “Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif”, Journal of Accounting, Vol.4/No.3/2015.
- Riris Katharina, “Akuntabilitas Kinerja Kementerian dan Menteri”, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No. 03/I/P3DI/2016.
- Satjipto Rahardjo, “Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan”, Harian Kompas, 19 Agustus 2002.

Naskah Ilmiah

- A. Fahmi Shahab, *Pengantar Mediasi*, Makalah (dibawakan dalam Diklat Mediasi, diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia), 18–22 Desember 2012.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah (dibawakan dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), 1 Mei 2000.

- Basrief Arief, *Reformasi Penegakan Hukum dan Penguatan Kelembagaan Di Lingkungan Kejaksaan R.I.*, Makalah (dibawakan dalam Focus Group Discussion, diselenggarakan Jaksa Agung Republik Indonesia, 12 Oktober 2011.
- Budhi Masthuri, *“Investigasi Ombudsman Nasional, Sebuah Refleksi Dari Pengalaman Di Lapangan”*, Makalah (dibawakan dalam TOT Investigasi Ombudsman Nasional, diselenggarakan oleh Ombudsman), 5–7 Februari 2002.
- Hardijanto, *Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance*, Jakarta: Work Paper TOT, 2002.
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Indo Barometer, *Evaluasi Publik Dua Setengah Tahun Pemerintah Jokowi-JK*, Jakarta: Indo Barometer, 2017.
- Indonesia Corruption Watch, *Temuan Survei Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan KPK dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2015.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2016*, Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2017.
- Komisi Hukum Nasional, *Penyederhanaan Prosedur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Laporan Penelitian KHN.
- Mahmud Syaltout, *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Marjono Reksosiputro, *“Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Makalah (dibawakan dalam Semiloka, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 13 Desember 2000.
- Masyarakat Transparansi Indonesia, *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Wawasan dan Monitoring Keuangan Daerah*, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2005.
- Nugroho Andriyanto, *“Klasifikasi Administrasi Laporan dan Penyusunan Ringkasan Laporan,”* Makalah (disampaikan dalam Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan, diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID), 16–22 Maret 2014.

Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah (dibawakan dalam Seminar Nasional Penataran Hukum Administrasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 1998.

Ombudsman, *Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan III Tahun 2017*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2017.

Romli Atmasasmita, *Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah (dibawakan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional Ke-VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), 14–18 Juli 2003.

Internet

ACFE, “*Fraud Tree*”, <http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx/>, diakses 29 April 2017.

Antara News, “*Kejagung Jatuhkan Sanksi Terhadap 93 Jaksa Pada 2016*”, <https://www.antaraneews.com/berita/604825/kejagung-jatuhkan-sanksi-terhadap-93-jaksa-pada-2016>, diakses 4 Januari 2017.

Anonim, “*Teori Abraham Moslow*”, <http://wardalisa.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/26402/Materi%2B07%2B-%2BTeoriAbrahamMaslow.pdf>, diakses 27 April 2017.

Damang, “*Teori Kedaulatan*”, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-kedaulatan.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2017.

Detik News, “*Ini Hasil Evaluasi Kementerian-Lembaga, Siapa Dapat Rapor Merah*”, <https://news.detik.com/berita/d-3570787/ini-hasil-evaluasi-kementerian-lembaga-siapa-dapat-rapor-merah>, diakses 9 Desember 2017.

Emerson Yuntho, “*Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi>, diakses 27 Desember 2017.

Enny Nurbaningsih, “*Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*”, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

K. A. Tajuddin, “*Good Governance, Konsep dan Implementasi di Kabupaten Bangka*”, http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=7, diakses 10 tanggal Agustus 2017.

Kompas, “*Kinerja Kejagung Dikritik ICW, Apa Kata Jaksa Agung*”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/18/17360381/kinerja.kejagung.dikritik.icw.apa.kata.jaksa.agung>, diakses 5 Desember 2017.

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2, diakses 13 Desember 2017.

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Tugas dan Wewenang*”, <https://komisi-kejaksaan.go.id/tugas-dan-wewenang>, diakses 3 Januari 2017.

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Evaluasi Kinerja*”, https://kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=8&idkat=7, diakses 21 Desember 2017.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Riwayat Kejaksaan di Nusantara*”, <http://www.kejati-diy.go.id/179-artikel-riwayat-kejaksaan.html>, diakses 12 Desember 2017.

KemenPAN-RB, “*Reformasi Birokrasi*”, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, diakses 20 Desember 2017.

Krisnawenda, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (dibawakan dalam Diklat Mediasi, diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia), 18–22 Desember 2012.

Liputan 6, “*Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi di Eksekusi Mati Humpyrey*”, <http://news.liputan6.com/read/3038669/ombudsman-sebut-ada-maladministrasi-di-eksekusi-mati-humpyrey>, diakses tanggal 8 Oktober 2017.

PERC, “*Political and Economic Risk Consultancy, Ltd.- PERC*”, <http://www.asiarisk.com/>, diakses 6 Februari 2017.

Poltracking Indonesia, “*Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi atau Penegak Hukum Menurut Survei Poltracking Indonesia*”, <https://poltracking.com/category/publikasi>, diakses 14 Desember 2017.

Wikipedia, “*Semua Manusia Diciptakan Setara*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Semua_manusia_diciptakan_setara, diakses tanggal 11 Agustus 2017.

William Antonio Boyle, sebagaimana dikutip Purwaning M. Yanuar, “*Abuse of Power Sebagai Suatu Kejahatan*”, <https://docslide.net/documents/abuse-of-power-sebagai-suatu-kejahatan.html>, diakses 26 Desember 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

